

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bertambahnya populasi penduduk maka kebutuhan akan pelayanan kesehatan semakin meningkat. Pelayanan kesehatan yang rasional harus mempertimbangkan efektivitas, keamanan, kesesuaian, dan keterjangkauan secara ekonomi. Di Indonesia ini tidak semua masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan terutama masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Oleh karena itu Pemerintah membuat berbagai program dan kebijakan tentang pendanaan, seperti program jaminan kesehatan sosial, sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta mengatasi masalah kesehatan masyarakat miskin. Salah satu program tersebut adalah Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008 (Medisa *et al.*, 2015).

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup (Kemenkes RI, 2013). Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas) yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (Dinkes Kabupaten Banjar, 2019).

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup perlu disusun daftar obat dalam bentuk formularium (Kemenkes RI, 2017).

Formularium Nasional (Fornas) adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, berdasarkan pada bukti ilmiah, mutakhir, berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional. Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan, sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Dirjen Binfar & Alkes, 2014). Fornas bersifat dinamis sehingga perlu dilakukan evaluasi atau revisi obat Fornas sesuai dengan kebutuhan medis dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pelayanan kefarmasian salah satunya yaitu pelayanan resep (Kemenkes RI, 2016). Peresepan yang baik akan meningkatkan penggunaan obat secara rasional sehingga pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang tepat untuk jangka waktu yang cukup dengan biaya yang rendah (WHO, 2004).

Formularium Nasional bertujuan untuk menyediakan acuan nasional bagi Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya termasuk Puskesmas, menyediakan acuan bagi tenaga medis untuk menetapkan pilihan obat yang tepat, berkhasiat, aman, dengan harga yang terjangkau, mendorong penggunaan obat secara rasional sesuai standar, sehingga pelayanan kesehatan lebih bermutu dengan belanja obat yang terkendali (*cost effective*). Selain itu mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien kepada masyarakat dan memudahkan perencanaan dan penyediaan.

Manfaat Formularium Nasional salah satunya untuk pengendalian mutu dan untuk mengoptimalkan pelayanan pada pasien (Kemenkes RI, 2013). Mengacu pada Formularium Nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dan Tim menyusun Formularium Obat yang digunakan sebagai acuan untuk pelayanan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) di wilayah Kabupaten Banjar.

Puskesmas Mataraman merupakan Puskesmas yang berada di wilayah Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar yang melayani resep pasien umum, pasien dengan jaminan kesehatan BPJS dan pasien gratis yaitu masyarakat yang kurang mampu dan siswa yang sekolahnya berada di wilayah kerja Puskesmas Mataraman. Penulisan resep yang tidak dengan formularium dapat berpengaruh terhadap lama waktu pelayanan obat, adanya pergantian obat, dan adanya resep yang ditolak menyebabkan pasien harus membeli obat di luar, dan hal tersebut dapat berdampak pada kepuasan pasien juga kesembuhan pasien yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan Puskesmas. Berdasarkan dari hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Gambaran Peresepan Obat Terhadap Formularium di Puskesmas Mataraman.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penulisan ini adalah “Bagaimana Gambaran Kesesuaian Peresepan Obat Terhadap Formularium di Puskesmas Mataraman?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran kesesuaian peresepan obat terhadap formularium di Puskesmas Mataraman.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Bagi Puskesmas Mataraman

Sebagai bahan evaluasi bagi Puskesmas Mataraman dalam rangka pengelolaan obat yang menjamin ketersediaan obat meningkatkan efisiensi dalam manajemen persediaan, serta memberikan informasi tentang kesesuaian penulisan resep dengan Formularium Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

### 1.4.2 Bagi institusi

Sebagai bahan masukan bagi institusi dalam menambah pustaka dan referensi untuk peneliti selanjutnya.

### 1.4.3 Bagi peneliti

Untuk menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dan menambah pengetahuan terkait kesesuaian peresepan obat terhadap Formularium Puskesmas.